

STRATEGI POLITIK PEMERINTAHAN SIWOLE MBATOHU DAN PITU DULA BATU DI KERAJAAN KONAWA PADA ABAD KE XVII

Aswati, M.

Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Universitas Halu Oleo,

aswati.mukadas@yahoo.com

Abstrak: Dengan pertimbangan luas wilayah kerajaan Konawe yang meliputi daratan Sulawesi tenggara, serta guna menjaga keamanan wilayah kerajaan dari berbagai ancaman baik dari dalam maupun dari luar agar tetap dalam persatuan maka Mokole Tebawo menyusun strategi politik pemerintahannya yang disebut Siwole Mbatohuu dan Pitu Dula Batu yakni empat wilayah pemerintahan agar pemerintahan mudah dikontrol. Pemerintahan tingkat Wonua (negeri) dipimpin oleh seorang raja sebagai pemimpin tertinggi berkedudukan di Unaaha dibantu seorang Sulemandara sebagai wakil raja. Seorang Mokole mempunyai fungsi mengayomi serta melindungi seluruh rakyatnya. Pemerintahan ditingkat daerah yang terdiri dari empat wilayah yakni gerbang timur di Ranomeeto, gerbang barat di Tongauna, Barata I hana di Anggaberri dan Barata I moeri di Asaki Lambuya, masing-masing dipimpin seorang Raja bawahan. Menjalankan pemerintahan di daerah dengan membawahi beberapa wilayah puutobu. Pitu Dula Batu sebagai aparat kerajaan sebagai pembantu raja dan menjalankan fungsinya dalam bidang pertahanan didarat dan di laut, mengurus bidang ekonomi, menyelesaikan masalah peradilan adat, melayani masyarakat yang mencari keadilan, dan memelihara hubungan baik antar warga. Pemerintahan O,Tobu yang dipimpin seorang Puutobu setingkat kecamatan, pemerintahan O,napo setingkat Desa dan pemerintahan Anggalo setingkat kampung.

Kata Kunci : Strategi, Politik, pemerintahan, dan kerajaan

PENDAHULUAN

Mempelajari sejarah suatu bangsa dimana pun didunia umumnya dan Indonesia khususnya adalah sangat penting bagi pembangunan nasional dimasa depan. Salah satu aspek pentingnya bahwa dengan mengetahui, memahami dan menghayati latar belakang masa lampau suatu bangsa yang didalamnya mencakup sejarah lokal yang beraneka ragam maka nilai-nilai luhur yang terkandung didalamnya akan dapat digali, dipelihara dan dilestarikan serta diambil manfaatnya. Nilai-nilai luhur yang dimaksud seperti nilai-nilai kepahlawanan, nilai-nilai kepemimpinan, system norma, system hukum dan aturan-aturan khusus yang ada dalam masyarakat dapat dikembangkan bagi kepentingan pembangunan bangsa saat ini maupun di masa depan.

Perubahan-perubahan atau peristiwa yang dialami manusia pada masa lampau utamanya perubahan pada watak masyarakat sangat penting artinya bagi kehidupan masyarakat saat ini sebagai bahan koreksi atas diri dan lingkungannya agar dimasa mendatang dapat membawa keberhasilan. Dengan belajar dari masa lalu kita dapat mengambil hikmah yang positif dalam membangun masa depan yang lebih baik. Kehidupan masa kini merupakan mata rantai yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia sebelumnya dan generasi yang akan datang.

Dari ungkapan diatas dapat memperluas cakrawala pengetahuan kita terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk memperhatikan dan mengkaji jejak-jejak sejarah yang ditinggalkan baik yang bersifat local maupun nasional. Salah satu wujud nyata dari hal-hal tersebut adalah melakukan

penggalan terhadap sumber-sumber sejarah dan budaya peninggalan masa lampau yang wujudnya dalam bentuk kebudayaan materil maupun kebudayaan nonmaterial yang diperoleh melalui beberapa sumber baik sumber-sumber tertulis, lisan maupun dalam bentuk artefak.

Sebagaimana kerajaan-kerajaan lain di nusantara yang pernah mengalami kejayaan, maka kerajaan Konawe merupakan salah satu kerajaan yang pernah muncul, berkembang dan akhirnya mengalami kehancuran yang dipimpin oleh beberapa orang Raja yang bergelar Mokole. Pada masa pemerintahan para Mokole selalu berusaha mengembangkan kerajaannya dalam berbagai bidang pemerintahan, ekonomi, social budaya dan pertahanan keamanan. Keberadaan Kerajaan Konawe di daratan Sulawesi Tenggara tidaklah sepopuler kerajaan-kerajaan lain di nusantara seperti kerajaan Sriwijaya, dan kerajaan Majapahit, namun kerajaan Konawe telah meninggalkan jejak masa lalu yang tidak akan dilupakan oleh masyarakat di Sulawesi Tenggara.

Pada masa pemerintahan Mokole Tebawo kerajaan Konawe mengalami masa kejayaannya. Berdasarkan temuan data dilapangan menunjukkan bahwa Mokole Tebawo telah menjalankan strategi politik pemerintahannya dengan baik, dengan menyusun struktur pemerintahan Siwole Mbatohuu dan Pitu Dula Batu yang masing-masing menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik pula. Disamping itu praktek kepemimpinan yang dijalankan seorang pemimpin patut ditiru sebagaimana yang dijalankan Mokole Tebawo yang disebut dengan *Mohopulei Wonua*, *Mombulesako toono nggapa*, dan *Mosiwi-siwi toono Meohai*, merupakan potensi politik yang menjadi factor strategis bagi pengembangan jiwa, dan semangat kerukunan masyarakat, bangsa dan Negara (Tarimana, 1989 :75) Maksudnya seorang pemimpin harus mampu membina, mengayomi negeri dan penduduknya, agar senantiasa dalam keadaan yang kompak dan bersatu.

Dengan model kepemimpinan tradisional seperti ini terbukti mokole Tebawo mampu mengantarkan kerajaan Konawe dikenal oleh kerajaan-kerajaan tetangganya dan menjalin hubungan bilateral dengan kerajaan Mekongga, Gowa, Bone, Luwu, Moronene, Muna, Buton, Banggai, dan Ternate.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Konawe, Konawe Utara dan Konawe Selatan dan kota Kendari dengan pertimbangan wilayah tersebut merupakan bekas wilayah kerajaan konawe pada masa pemerintahan Raja Tebawo berdasarkan struktur pemerintahan Siwole Mbatohuu dan Pitu Dula Batu.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan strukturalis yang mempelajari peristiwa dan struktur sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi. Artinya peristiwa mengandung kekuatan mengubah struktur social, sedangkan struktur mengandung hambatan atau dorongan bagi tindakan perubahan dalam masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan metode sejarah terdiri dari Heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi.

Teknik pengumpulan data dilakukan sesuai dengan metode penelitian sejarah yang terdiri dari tiga tahap yaitu :

1. Heuristik, yakni tahap pengumpulan data melalui (1) Penelitian kepustakaan dengan menelaah beberapa sumber tertulis berupa buku-buku, dan hasil-hasil penelitian terdahulu. Yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.,(2) Penelitian Lapangan yaitu kegiatan yang dilakukan dengan melakukan peninjauan langsung pada lokasi penelitian (pengamatan) guna menyaksikan langsung posisi/wilayah bekas kerajaan Konawe yang meliputi daratan Sulawesi Tenggara, sekaligus melakukan wawancara dengan sejumlah informan yang dianggap banyak mengetahui masalah yang diteliti dengan mempertimbangkan factor usia, keturunan dan pengetahuan yang dimiliki., (3) Studi Dokumen, yakni mempelajari beberapa sumber dokumen serta asip-arsip daerah yang memuat tentang masalah yang diteliti.
2. Kritik (Verifikasi) sumber data penelitian. Setelah data terkumpul kemudian dilakukanlah kritik sumber guna mendapatkan data yang otentik (asli, sejati) dan kredibel. Kritik data dilakukan melalui dua cara yakni kritik internal dan kritik eksternal. (1) Kritik internal dilakukan untuk melakukan pengujian terhadap aspek dalam dari sumber sejarah tersebut, berupa isi dari sumber kesaksian, dan (2) kritik eksternal yakni melakukan pengujian terhadap aspek-aspek luar dari sumber sejarah tersebut guna merekonstruksi masa lalu.
3. Historiografi, yakni tahap penyusunan data dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menyusun dan mendeskripsikan sebuah kisah sejarah dengan terlebih dahulu melakukan penafsiran data melalui analisis dan sintesis, eksplanasi (penjelasan) dan penyajian (ekspose)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Struktur Pemerintahan Siwole Mbatohu dan Pitu Dula Batu

Pada akhir abad ke XVII kerajaan Konawe mengalami perkembangan pesat ditandai dengan kemajuan dalam berbagai bidang baik politik, ekonomi, social budaya ,maupun pertahanan dan keamanan. Hal ini tidak terlepas dengan system pemerintahan yang dijalankan oleh seorang pemimpin kerajaan dalam hal ini Mokole dikerajaan Konawe. Dengan naiknya Tebawo sebagai Mokole di kerajaan Konawe, maka beliau segera melakukan perubahan-perubahan dalam system pemerintahan dengan belajar dari pengalaman pemerintahan yang dijalankan oleh pemimpin sebelumnya. Munculnya seorang pemimpin sangat diperlukan dalam keadaan-keadaan dimana kelompok social yang bersangkutan terhalang atau apabila kelompok tadi mengalami ancaman dari luar, sehingga muncullah seseorang yang mempunyai kemampuan menonjol yang diharapkan akan menanggulangi segala kesulitan-kesulitan yang ada (Soekanto,2013).Dengan kondisi kerajaan Konawe yang sering mendapatkan ancaman dari luar maka Mokole yang baru diangkat segera menyusun system pemerintahan dimana sebelumnya kerajaan Konawe mengalami kemunduran akibat perang saudara dengan kerajaan-kerajaan kecil lainnya. Belajar dari pemerintahan sebelumnya maka raja Tebawo segera menyusun system pemerintahan kerajaan Konawe yang dikenal dengan *Siwole Mbatohu* dan *Pitu Dula Batu* dalam bahasa Tolaki artinya talam persegi empat dan tujuh wadah batu. Yaitu suatu wilayah kekuasaan kerajaan yang berbentuk segi empat seperti siwole berupa wadah anyaman yang terbuat dari daun agel yang biasa digunakan untuk meletakkan kalo sara.

Jadi siwole mbatohu merupakan suatu istilah ketatanegaraan yang diperkenalkan oleh Raja Tebawo dalam membangun dan menyelenggarakan pemerintahannya. Raja Tebawo membagi wilayah kekuasaan kerajaan Konawe terdiri dari empat sub wilayah besar yang masing-masing wilayah ditempatkan penguasa wilayah otonom dibawah kekuasaan pemerintahan pusat yang berpusat di Unaaha. Adapun empat wilayah besar kerajaan Konawe terdiri dari :

- a. Tambo Ilosoano Oleo atau gerbang timur yaitu Ranomeeto dengan rajanya bergelar Sapati.
- b. Tambo itepuliano Oleo atau gerbang barat yaitu wilayah Latoma dengan rajanya bergelar Sabandara.
- c. Barata l'hana atau sayap kanan yaitu wilayah Tongauna dengan rajanya bergelar Ponggawa.
- d. Barata l'moeri (sayap kiri yaitu wilayah Asaki dengan rajanya bergelar Inowa.

Pembentukan empat titik wilayah kekuasaan kerajaan Konawe dimaksudkan agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik sebab wilayah kerajaan Konawe sangat luas guna menghindari timbulnya konflik dalam kerajaan serta menjaga wilayah kerajaan dari gangguan yang sewaktu-waktu mengancam kerajaan Konawe dengan menempatkan seorang penguasa wilayah yang bertanggung jawab terhadap wilayah kekuasaannya.. Pusat pemerintahan berada di Unaaha. Hal ini dilakukan sebagai salah satu strategi politik dan pertahanan keamanan agar wilayah kerajaan konawe aman dan tentram sebagaimana dikatakan bahwa "Pertahanan mengandung pengertian sebagai perlindungan untuk mempertahankan diri yang dilakukan oleh suatu daerah atau Negara terhadap ancaman dari bangsa lain. (Salim, 1991). Lebih lanjut dikatakan bahwa "Pertahanan adalah bagian dari strategi yang mengacu kepada arah pencapaian tujuan. Pertahanan merupakan dasar bagi perencanaan untuk persiapan perang". (Suyohadiprodo, 1985). Penyusunan struktur pemerintahan ini dimaksudkan agar kerajaan Konawe terhindar dari usaha kerajaan-kerajaan lain melakukan invasi, mengingat wilayah kerajaan Konawe kaya akan sumber daya alamnya dan terkenal sebagai lumbung padi. Untuk menciptakan suatu kondisi bangsa dan Negara yang aman, hanya dapat dicapai melalui upaya mempertahankan diri dari berbagai bentuk ancaman, hambatan, tantangan dan gangguan baik yang bersumber dari luar maupun dari dalam.

Guna menjalankan roda pemerintahan di daerah maka diangkatlah seorang pimpinan dengan status raja bawahan yang bertanggung jawab langsung kepada Mokole di Unaaha. penempatan unaaha sebagai ibukota kerajaan dilihat dari posisi strategis keamanan dan pengembangan wilayah kerajaan, demikian pula dari segi administrasi pemerintahan dan pertimbangan social politik maupun maupun social budaya dimana kota Unaaha terletak ditengah-tengah wilayah dari siwole mbatohu.

Setelah wilayah kerajaan Konawe dibagi empat sudut wilayah pemerintahan kemudian raja tebawo menyusun pitu dula batu yakni tujuh aparat kerajaan yang bertugas membantu raja dalam melaksanakan pemerintahannya, yang terdiri dari :

1. Aparat pertahanan yang disebut *Tutuwi Motaha, rambaha monggasono o una, polapi wungguarono wuta Konawe* dalam bahasa Tolaki diartikan bendera

- merah, batu asahan negeri una yang tajam, benteng pertahanan kerajaan Konawe yang dijabat seorang raja yang bergelar Anakia Ndamalaki yang berkedudukan di Anggaberri;
2. Aparat Pertanian yang disebut *Tusa Wuta rome-romeno wuta Konawe* artinya tiang pusat tanah sumber kemakmuran rakyat Konawe yang dijabat seorang raja bergelar Anakia Ndusawuta yang berkedudukan di Kasupute.
 3. Aparat Peradilan adat yang disebut *Bite Kinalumbi* atau pohon siri yang kokoh dan membelit yang dijabat seorang raja dengan gelar anakia Kinalumbi yang berkedudukan di Kasupute.
 4. Aparat Hakim adat yang disebut *Kotubitara* atau pemutus perkara yang dijabat seorang raja yang bergelar Anakia Mbabitara yang berkedudukan di Wonggeduku.
 5. Aparat penegak hukum yang disebut *Petumbu lara dati* artinya tiang agung rumah dari teras kayu jati yang dijabat oleh seorang raja dengan gelar Anakia Mbetumbu yang berkedudukan di Tuda One.
 6. Aparat Kerukunan Hidup yang disebut *Bite Metado* artinya daun siri yang bertulang parallel yang dijabat seorang raja dengan gelar Anakia Metadoa berkedudukan di Unaaha.
 7. Aparat mata-mata yang disebut *Tusa Lara dati* artinya tiang rumah dan teras kayu jati yang dijabat oleh seorang raja yang bergelar Anakia Ndusa Lara yang berkedudukan di Lalosabila. (Tarimana, 1989).

Sebelum Tebawo menjadi Raja, di Konawe seringkali mendapat ancaman bahaya dari luar yang ingin menghancurkan kerajaan Konawe, maka untuk menjaga wilayah kerajaan Konawe dari ancaman musuh khususnya musuh dari luar tersebut, maka raja Tebawo kemudian mengangkat pejabat kerajaan yang disebut Panglima Perang yang akan bertugas menjaga wilayah kerajaan Konawe di bagian darat dan wilayah kerajaan Konawe di bagian laut. Untuk pertahanan wilayah darat diangkat seorang pejabat yang disebut *Kapita Ana Molepo* artinya kapten anak muda yang berkedudukan di Uepai, dan panglima perang di laut disebut *Kapita lau* artinya kapten laut yang berkedudukan di Puusambalu Sampara. Kedua panglima perang tersebut mempunyai fungsi menjaga keamanan wilayah darat dari serangan musuh didarat dan serangan musuh di laut khususnya ancaman dari kerajaan Ternate, Tidore, Luwu, Banggai yang senantiasa melakukan gangguan-gangguan terhadap penduduk yang ada dipesisir pantai dan dekat dengan aliran sungai.

Setelah membentuk tujuh aparat kerajaan serta dua panglima perang guna menjaga pertahanan di darat dan dilaut, raja Tebawo juga membutuhkan orang yang dapat membantunya dalam menjalankan roda pemerintahan yang dapat mengurus urusan administrasi pemerintahan. Maka diangkatlah seorang Wakil yang bergelar Sulemandara artinya raja suri tauladan yang pandai yang akan bertindak selaku penyelenggara urusan pemerintahan dalam negeri kerajaan yang berkedudukan di Pu'Osui, serta dua aparat pendamping Mokole ialah pengawal istana yang disebut Tu'oi artinya bambu runcing yang berkedudukan di Unaasi dan kepala rumah tangga istana yang disebut Anakia mombonahu ako artinya pengurus dapur istana raja yang berkedudukan di Toriki. (wawancara, Muslimin Su'ud, 22 Agustus, 2013)

Guna mempersiapkan calon pengganti Raja, maka dibentuk pula satu jabatan yang disebut Inea Sinumo, wuta mbinotiso artinya pinang terbungkus yang tersimpan, tebu terpelihara, negeri cadangan kerajaan Konawe yang berkedudukan di Abuki.

Untuk menjalankan politik ekspansi kerajaan Konawe ke bagian selatan kerajaan, dengan melihat potensi yang dimiliki wilayah selatan ini yang dapat dikuasai maka Mokole menetapkan suatu daerah istimewa yang disebut daerah istimewa Andoolo yang dikuasai seorang raja dengan gelar Mokole Andoolo yang berkedudukan di Andoolo.

Seiring dengan pembentukan tujuh aparat kerajaan serta beberapa dewan adat kerajaan ditetapkan pula pembagian wilayah bawahan kerajaan yang disebut Pu'tobu semacam wilayah setingkat kecamatan yang berjumlah 30 wilayah Pu'Tobu yang pejabatnya merupakan keturunan bangsawan dari raja yang berkuasa. Masing-masing Pu'Tobu bertanggung jawab kepada Raja melalui penguasa wilayah kerajaan sepanjang menyangkut urusan pemerintahan dan kepada raja melalui Kotu Bitara (menteri kehakiman) di Wonggeduku dan yang menyangkut masalah urusan adat dan hukum adat. (Tarimana, 1989).

Pembagian wilayah bawahan kerajaan yang dimaksud dengan memperhatikan letak geografis dari wilayah tersebut dimana para Dewan adat kerajaan bermukim dan juga berdasarkan hirarki jabatan dan tanggung jawab pelaksanaan tugasnya sesuai apa yang telah ditetapkan dalam dewan adat kerajaan. Maka yang dimaksud ke-30 wilayah Pu'Utobu yang bertanggung jawab melalui keempat pejabat penguasa wilayah masing-masing Ranomeeto, Latoma, Tongauna dan Asaki. Adapun susunan dan pembagian wilayah Puu'Tobu adalah sebagai berikut:

- a. Wilayah Gerbang timur kerajaan di Ranomeeto membawahi puu'tobu-puu'tobu:

1. Poasia	6. Konda
2. Moramo	7. Andaroa (Sampara)
3. Kolono	8. Besu (sampara)
4. La Eya	9. Lembo (Sampara)
5. Wawonii.	
- b. Wilayah Gerbang barat kerajaan di Latoma membawahi Puu'tobu-puu'tobu :

1. Arombu	5. Asera
2. Waworaha	6. Lawata (Lalowata)
3. Puu'lemo (Kolut)	7. Laloeha (Kolaka)
4. UeEsi	
- c. Wilayah sayap kanan kerajaan (Tongauna) membawahi Puu'tobu-puu'tobu :

1. Toriki	5. Wawotobi
2. Anggaberri	6. Teteano
3. Kasipute	7. Lasolo/Andumowu
4. Anggotoa	
- d. Wilayah sayap kiri kerajaan di Asaki membawahi puu'tobu-puu'tobu :

1. Puriala	5. Tinondo
2. Angata	6. Morehe
3. Lalohao	7. Kowioha

4. Rate-Rate.

Selain pembagian 30 wilayah bawahan yang dikepalai seorang Puu'tobu tersebut diatas juga ditetapkan tiga wilayah puutobu untuk daerah khusus semacam daerah istimewa di Abuki dan dalam menjalankan tugasnya sehari-hari bertanggungjawab pada Inea Sinumo (putra Mahkota Kerajaan Konawe) bila menyangkut urusan adat, sedangkan urusan pemerintahan tetap bertanggung jawab kepada Mokole (Raja). Adapun ketiga wilayah puu'tobu tersebut adalah : (1) Asolu; (2). Lasada; dan (3). Walay. (Tarimana, 1989).

Demi kelancaraan tugas-tugas yang diembannya Raja Tebawo menetapkan susunan pejabat pemerintahan pusat kerajaan Konawe yaitu Sulemandara (Perdana Menteri) yang pada masa pemerintahan raja Tebawo dijabat oleh Kalenggo, dimana dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh aparat kerajaan yang terdiri dari :

1. Anakia Mombonahuako (kepala urusan rumah tangga kerajaan) yang dijabat oleh Pagala
2. Tutuwi Motaha (Asisten pribadi raja) yang dijabat oleh Pakandate.
3. Tuoy (komandan pengawal/ pasukan tempur kerajaan) yang dijabat oleh Podada.
4. Dunggu (kepala urusan protokoler kerajaan) yang dijabat oleh Lakonggoasa
5. Totonaono wuta Konawe (penghulu adat yang melakukan sumpah kepada raja yang akan dilantik yang dijabat oleh empat orang masing-masing :
 - a. Untuk gerbang barat dijabat oleh Lasepe berkedudukan di Abuki/Walay
 - b. Untuk wilayah sayap kanan dan sayap kiri dijabat oleh Manusere berkedudukan di Lalonggowuna.
 - c. Untuk wilayah gerbang timur kerajaan dijabat oleh Labunggasi berkedudukan di Punggolaka/Puwatu
 - d. Untuk para pejabat tingkat Pitu Dula Batu di jabat oleh Lakonggoasa berkedudukan di Dunggu/ Amonggedo Pondidaha.
6. Kapita Ana Molepo (Panglima Angkatan Darat Kerajaan Konawe yang dijabat oleh Taridala berkedudukan di Uepay kecamatan Lambuya sekarang.
7. Kapita Lau (Panglima angkatan laut) yang dijabat oleh Haribau berkedudukan di Puu Sambalu (Pohara sekarang).
8. Tusa Wuta (menteri urusan pertanian merangkap urusan kemakmuran rakyat kerajaan Konawe yang dijabat oleh Latuo kerkedudukan di Kasupute.
9. Kotu Bitara (menteri kehakiman kerajaan/Mahkama Agung) yang dijabat oleh Lelesuwa berkedudukan di Wonggeduku.
10. Putera Mahkota Kerajaan Konawe yang bergelar Inea Sinumo dijabat oleh Maraney, berkedudukan di Abuki sebagai daerah khusus kerajaan Konawe.
11. Pada Menteri Panglima Agkatan Darat tersebut diatas dibentuk kepala-kepala urusan yang terdiri dari :
 - a. Kukuano wuta Konawe (kepala urusan sejarah dan dokumentasi kerajaan Konawe yang dijabat oleh Lapabuka, berkedudukan di Pehanggo dan pejabatnya dari golongan Toono Motuo.
 - b. Parewano Wuta Konawe (kepala urusan persenjataan yang dijabat oleh L Pombili berkedudukan di Sanggona pejabatnya berstatus Toono Motuo.

Mempunyai tugas menyiapkan atau memproduksi alat-alat pertanian dan alat-alat perang seperti tombak, parang dan badik.

- c. Pokosanggano wuta konawe (kepala urusan logistic/perlengkapan kerajaan konawe yang dijabat oleh Latiiho osi berkedudukan di Tawanga pejabatnya status toono motuo.(Tarimana, 1989).

Berdasarkan komposisi pembagian wilayah dan pejabat berdasarkan struktur pemerintahan siwole mbatohu dan opitu dula batu yang telah dikemukakan diatas dapat dilihat bahwa tingkatan kekuasaan kerajaan Konawe terbagi atas empat tingkatan yaitu :

1. Tingkat Wonua (Kerajaan) dikepalai oleh Mokole (Raja)
2. Tingkat daerah besar Siwole mbatohuu dan pitu dula batu dikepalai oleh penguasa wilayah
3. Tingkat daerah bawahan (o'Tobu) yang dikepalai oleh Puutobu
4. Tingkat Desa (Napo) yang dikepalai oleh Toono Motuo. (Dokumenta, 1982).

Jika memperhatikan pembagian wilayah kekuasaan pemerintahan sebagaimana telah digambarkan diatas dilakukan oleh raja Tebawo untuk memperlancar jalannya roda pemerintahan kerajaan yang dipimpinnya baik secara vertical maupun secara horizontal. Sebagai dasar politik pemerintahan Kerajaan konawe untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan antara ketiga golongan dalam stratifikasi sosial yakni golongan bangsawan, sebagai pemerintah dan sebagian Toononggapa sebagai pemangku adat dan sebagai rakyat yang diperintah.

b. Tugas dan Fungsi Siwole Mbatohu dan Pitu Dula Batu dalam Kerajaan Konawe

Pada masa pemerintahan Raja Tebawo wilayah kerajaan Konawe sangat luas meliputi wilayah Kabupaten Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan dan Kota Kendari. Oleh karena pertimbangan luas wilayah itulah Mokole kemudian melakukan perubahan struktur pemerintahan sebelumnya dengan membagi wilayah kekuasaan menjadi empat sudut wilayah pemerintahan dengan tujuan agar pemerintahan dengan mudah dapat dikontrol. Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa maksud dari pembedaan struktur pemerintahan siwole mbatohuu agar roda pemerintahan berjalan sesuai dengan fungsinya.

Pada tingkat wonua atau negeri yang dipimpin oleh seorang Raja yang disebut Mokole atau Sangia sebagai pemimpin tertinggi dalam kerajaan Konawe yang berkedudukan di Unaaha dalam menjalankan pemerintahan dibantu seorang Sulemandara sebagai wakil Raja, tujuh aparat pemerintahan (menteri), dan kapita sebagai panglima perang (laut dan darat) serta Tuo'i sebagai penjaga keselamatan raja. Setiap pengganti raja/Mokole. Sebelum diangkat menjadi Mokole terlebih dahulu mengangkat sumpah dihadapan rakyat bahwa ia akan mentaati adat dan hukum yang berlaku, dan sebaliknya raja berjanji akan mentaati segala kebijakan dan perintah raja. "Apabila raja melanggar adat dan hukum yang berlaku maka jahelaha yang akan memanasakan nyawanya, besilah yang akan memotong lehernya, aranglah yang akan menodai namanya, dan tanahlah tempat ia dikuburkan. Sebaliknya apabila rakyat yang melanggar perintah dan kebijakan Mokole maka kemiskinan, kepapaan dan kepunahan yang akan menimpah seluruh rakyat dan masyarakatnya".(Tawulo, 1987). Disamping itu seorang raja harus mampu

mengayomi kehidupan masyarakat. Syarat berani dan sakti diperlukan sebagai sumber potensi pertahanan atas gangguan yang timbul dan terciptanya suasana keamanan dan kedamaian dalam kerajaan. Jadi tugas dan fungsi Mokole adalah mengayomi serta melindungi seluruh rakyatnya.

Dalam menjalankan pemerintahan pusat Raja dibantu oleh seorang Sulemandara yang mempunyai tugas khusus untuk menyusun dan melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian pejabat kerajaan yang masa jabatannya sudah habis, dan mengusulkan kepada raja untuk menunjuk pengganti yang baru bekerjasama dengan Inea Sinumo (calon Raja).

a. Siwole Mbatohuu yang terdiri dari empat wilayah masing-masing dipimpin seorang Mokole bawahan, jika disejajarkan dengan pemerintahan sekarang setingkat pembantu bupati yang berfungsi mengkoordinasikan tugas bupati pada wilayah tertentu, agar pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan dengan baik terutama dalam pengawasan untuk menghindari adanya penyelewengan pada wilayah tertentu. Para Mokole di empat wilayah menjalankan roda pemerintahan sesuai instruksi dari Mokole sebagai pemimpin tertinggi. Sulemandara menjalankan fungsi sebagai kepala pemerintahan secara umum, ia menjalankan pemerintahan dan mengambil keputusan mewakili raja apabila raja berhalangan (dalam kondisi sakit, atau mangkat). Sulemandara tidak mempunyai wilayah teritorial khusus tetapi berkedudukan di Tongauna. (Basrin Melamba, 2011).

b. Pitu Dula Batu atau tujuh aparat kerajaan masing-masing menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pembantu Mokole menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan bidangnya masing-masing adalah : (a) pertahanan tugasnya menjaga wilayah kerajaan dari serangan musuh baik dari dalam maupun diluar yang terdiri dari pertahanan dilaut dan di darat. (b) Tusawuta, mengurus penguasaan dan pemilikan tanah dan mengurus masalah penentuan lahan pertanian, pemukiman, batas-batas pemukiman mengkoordinir kerja gotong royong, mengatur tanah yang dilarang untuk diolah. (c) Peradilan adat bertugas menyelesaikan segala urusan yang berkaitan dengan pelanggaran hokum adat. (d) Aparat hakim adat (Pabitara) bertugas melayani masyarakat yang ingin mencari keadilan tentang hak milik pribadi yang berkaitan dengan utang piutang dalam hal ini yang berkaitan dengan perkara perdata. (e) Penegak hukum atau Mahkamah Agung bertugas mengamati memelihara dan mengawasi seluruh aparat kerajaan dalam menjalankan tugasnya agar sesuai dengan aturan hukum adat, menetapkan berlaku tidaknya suatu aturan hukum adat dalam suatu wilayah., (f) Aparat Kerukunan Hidup memelihara hubungan yang baik antara sesama warga kerajaan baik antara kelompok dengan kelompok maupun antar individu dengan individu lainnya agar senantiasa terjalin suasana hidup yang aman. (g) Aparat Intelijen, atau mata-mata bertugas menjaga keselamatan Negara dari serangan luar maupun dari dalam kerajaan Konawe. Peranan badan intelijen sangat penting bagi suatu Negara karena lemahnya intelijen maka suatu kerajaan atau Negara akan mengalami keruntuhan.

c. Kapita (Aparat Panglima Perang). Kapita adalah tangan besi dari Mokole yang menjadi tangan kanan dari kepercayaan raja yang menjabat sebagai panglima perang yang dijabat bangsawan tulen (anakia songo) bertugas menjaga keamanan di darat yang disebut Kapita Ana Molepo (Kapten Anak Muda) dan Kapita Lau

(Kapten di laut) (Tarimana, 1985). Dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Tamalaki (Prajurid) dan O Tadu (ahli strategi perang).

d. Tuo'i (pengawal Istana) yakni prajurit-prajurit pilihan yang mengawal keselamatan raja di istana kerajaan, mereka ini mempunyai keberanian dan kesetiaan untuk mengabdikan kepada Mokole/raja.

e. Mombonahuako (Juru masak kerajaan) berfungsi sebagai kepala rumah tangga istana dengan tugas mengurus dapur istana raja baik untuk keluarga raja maupun dalam menyambut tamu-tamu kerajaan melalui pesta pertemuan antar aparat kerajaan.

f. Pemerintahan Puutobu. Adalah pembantu pelaksana pemerintahan wilayah yang berkuasa dan bertanggungjawab kepada pemerintahan Siwole Mbatohuu yaitu empat penjuru pemerintahan daerah wilayah barat, timur, utara dan selatan. Pemerintahan Puutobu berkewajiban menyampaikan segala perintah dari pemerintah wonua kepada pemerintah O'napo demikian pula sebaliknya, misalnya masalah perselisihan dimasyarakat. Pada masa pemerintahan Raja Tebawo wilayah O'Tobu berjumlah 30 wilayah.

g. Pemerintahan O'napo. Pada pemerintahan O'napo mempunyai tiga aparat yaitu Toonomotuo (kepala desa), juru bicara (pabitara), tamalaki, Tolea, dan Posudo, mempunyai tugas menjalankan perintah raja/Mokole ditingkat desa. Pada zaman pemerintahan Raja Tebawo jumlah penduduk yang mendiami wilayah kerajaan Konawe terdiri dari 300 kepala keluarga.

h. Pemerintahan Anggalo (kampong) adalah pemerintahan terendah dalam kerajaan Konawe yang mempunyai aparat terdiri dari Tamalaki (kesatria), Mbuakoi (dukun penolak bencana), Mbuowai (dukun penyakit), Mbusehe (Dukun perdamaian), Mbusopu (pandai besi), dan Opande (tukang). Masing-masing aparat menjalankan fungsinya sesuai dengan keahlian yang dimilikinya, guna membantu masyarakat Konawe yang membutuhkan keahlian dari masing-masing aparat.

i. Sio Sowu Ana Niawo (Rakyat), yakni penduduk kerajaan Konawe pada masa pemerintahan Mokole Tebawo, mempunyai fungsi menjalankan kehidupannya sesuai dengan mata pencaharian yang digelutinya serta menjalankan segala perintah yang dikeluarkan oleh Mokole/Raja junjungannya. Bagi rakyat konawe Raja diibaratkan sebagai Sangia merupakan titisan dari dewa yang harus diikuti segala perintahnya.(Tawulo, 1987).

Dari penjeasan di atas nampak bahwa hubungan Siwole Mbatohuu dengan Mokole adalah hubungan antara penguasa pusat dengan penguasa daerah. Dimana Penguasa pusat memberikan dukungan kekuasaan lewat jalur otoritas tradisional sebagaimana telah diterima oleh masyarakat, dan pemerintah daerah diharapkan memberikan dukungan terhadap keputusan sang Mokole.(Basrin Melamba, 2011) Oleh karena itu jika ditelusuri lebih dalam bahwa pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas berdasarkan hubungan darah dari sang penguasa, hal tersebut sangat lumrah terjadi untuk menjaga loyalitas antara penguasa dan bawahan. Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari para siwole mbatohuu mendapatkan kepercayaan penuh dari sang Raja baik dalam bidang pemerintahan, ekonomi, maupun sosial budaya.

KESIMPULAN

Dengan pertimbangan luas wilayah kerajaan Konawe yang meliputi wilayah Kabupaten Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan serta Kota Kendari, serta demi menjaga keutuhan kerajaan agar tetap dalam persatuan dan kesatuan, serta keamanan akibat ancaman dari luar maka Mokole Tebawo menyusun strategi politik pemerintahannya yang disebut Siwole Mbatohuu dan Pitu Dula Batu agar pemerintahan mudah dikontrol.

Pada tingkat Wonua (negeri) dipimpin seorang raja sebagai pemimpin tertinggi berkedudukan di Unaaha sebagai ibukota kerajaan dibantu seorang Sulemandara (wakil Raja). Pemerintahan Daerah Siwole Mbatohu dan Pitu Dula Batu sebagai aparat Kerajaan menjalankan tugas di wilayahnya masing-masing yakni gerbang timur, barat, utara dan selatan. Pitu dula batu menjalankan tugas dalam bidang pertahanan, bidang ekonomi, bidang hukum, penyelesaian adat dan bidang peradilan. Peminggahan ditingkat O,tobu yng dipimpin seorang puutobu menjalankan tugas sebagai penyambung lidah dari Mokole ditingkat kecamatan, dan wilayah O,napo bertugas menjalankan pemerintahan ditingkat desa, serta wilayah Anggalo menjalankan peminggahan ditingkat kampung. Dengan demikian maka kerajaan Konawe mengalami masa kejayaannya hingga masuknya bangsa Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrul Tawulo dkk, 1987. *Stratifikasi Sosial dan Struktur Pemerintahan Menurut Adat Tolaki-Konawe Kabupaten Kendari*. Kendari. Balai Penelitian Unhalu.
- Abdurrauf Tarimana, dan Muslimin Su'ud, 1989. *Konsep Mohopulei Wonua (Budaya Kepemimpinn) Pada Masyarakat Tolaki di Propinsi Sulawesi Tenggara*. Kendari.: Balai Penelitian Unhalu.
- Abdurrauf Tarimana, 1989. *Kebudayaan Tolaki*, Seri Etnografi Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka.
- Artati, 2007. Inea Sinumo di Kerajaan Konawe pada abad ke-17. *Skripsi*, FKIP Unhalu. Kendari
- Basrin Melamba, dlkk, 2011. *Sejarah Tolaki di Konawe*. Yogyakarta : Penerbit TERAS.
- Peter, Salim, 1991. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta.
- Sahrin Mubarak, 1993. *Peranan Tusawuta di masa Pemerintahan Kerajaan Konawe (Suatu tinjauan sejarah)*, Skripsi FKIP Unhalu. Kendari.
- Sayidiman, Suryohadiprodjo, 1985. *Masalah Pertahanan Negara*. Jakarta : Intermasa.
- Soerjono Soekanto, 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi revisi, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.